



## PENDIDIKAN DALAM BELENGGU KONFLIK: STRATEGI DAN KONDISI PENDIDIKAN DI REPUBLIK YAMAN

Sudarto, Komarudin Sassi  
Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah, Indonesia

### Informasi Artikel

#### Sejarah Artikel:

Diterima 11 Nov 2024  
Perbaikan 2 Des 2024  
Disetujui 4 Des 2024

#### Kata kunci:

*Conflict, education, strategy  
Transition vision*

### ABSTRAK

*This research aims to understand the actual condition of the education sector in the Republic of Yemen, along with the strategies that have been prepared in the context of developing and improving the quality of education. The panorama that is being observed is not only a picture of Yemen which until now is still preoccupied by conflicts and political disputes. This paper is expected to be one of the scientific contributions for further research in related fields. The data in this paper was obtained using qualitative research methods by conducting literature studies from various sources. The data collected is presented as it is without providing any interpretation. From these various sources, some data was obtained from official documents. Although with the disclosure of the source of the document, statements or articles that are opinions are minimized so that scientific objectivity is maintained. Based on the studies that have been conducted, an important keyword has been found that covers development in all sectors (including education) in Yemen, namely the Yemen Strategic Vision 2025. Especially in the field of education, the Ministry of Education and Culture has prepared a set of plans and achievement parameters for a certain work period. This article is not proposed as a form of problem solving, but rather is intended as additional literature for a more comprehensive review.*

© 2024 BEGIBUNG

\*Surat elektronik penulis: [janeetahumaira32@gmail.com](mailto:janeetahumaira32@gmail.com)

### PENDAHULUAN

Dengan luas wilayah 527.970 km<sup>2</sup> (15.00° LU – 48.00° LT) Republik Yaman (*al-Jumhuriyah al-Yamaniah*) berlokasi di ujung semenanjung Arab berbatasan dengan Kesultanan Oman (timur), Kerajaan Arab Saudi (utara), Laut Arab (tenggara), Teluk Aden (selatan) dan Laut Merah (barat). Republik Yaman beribu kota Sana'a yang terletak ± 2.300 m di atas permukaan laut dengan rata-rata suhu 10°-26° C, kecuali pada bulan Desember hingga Februari suhu rata-rata 3°-22° C (Kementerian

Luar Negeri Republik Indonesia, 2018). Sejarah, budaya, ekonomi, dan populasi Yaman semuanya dipengaruhi oleh lokasi strategis negara tersebut di pintu masuk selatan Laut Merah (Wenner, 2024).

Yaman didominasi orang Arab dan berbicara (dialek) bahasa Arab. Etnis minoritas termasuk Mahra di Yaman timur dan pulau Socotra, yang berbicara varian bahasa Himyarite kuno. Penduduk pesisir memiliki ciri-ciri

Afrika, sedangkan di daerah Aden dan distrik-distrik timur, unsur-unsur Somalia, Indonesia, dan India dapat dilacak. Di ujung utara masih ada sisa-sisa komunitas Yahudi. Sebuah kelompok minoritas sosial yang berbeda adalah Akhdam (Muhamashin) di daerah pesisir, yang sebagian besar melakukan tugas-tugas kasar dan menempati kelas sosial terendah di Yaman (Diyarti, 2022).

Antara abad ke-12 SM dan abad ke-6 M, Yaman dikuasai oleh enam peradaban, yaitu Ma'in, Qataban, Hadramaut, Awsan, Saba', dan Himyar, yang bersaing satu sama lain, atau bersekutu sama lain dan menguasai perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan (The Metropolitan Museum of Art, 2000). Sebelum penyatuan (*unification*) pada tahun 1990, kawasan Yaman dikuasai oleh dua negara dengan pemerintahan masing-masing; Republik Arab Yaman dan Yaman Selatan. Kedua negara memiliki sistem politik yang sangat kontras. Di Yaman Utara pembuatan kebijakan berada di tangan elit militer yang relatif progresif yang bekerja erat dengan berbagai teknokrat sipil, pemimpin suku utama, dan tokoh tradisional (agama) lainnya. Sistem politik dan ekonomi Yaman Selatan telah didasarkan pada ideologi Marxis, di mana Partai Sosialis Yaman satu-satunya organisasi politik yang sah menentukan kebijakan pemerintah dan menjalankan kontrol atas sistem administrasi negara, legislatif, dan militer (Diyarti, 2022).

Penyatuan Yaman secara resmi disepakati oleh kedua negara pada 22 Mei 1990, dengan Ali Abdullah Saleh (yang sebelumnya merupakan Presiden Republik Arab Yaman) menjabat sebagai presiden, Ali Salim al-Beidh (sebelumnya merupakan Presiden Yaman Selatan) menjabat sebagai wakil presiden (BBC, 2019), dan Haydar Abu Bakr al-Attas menjadi perdana menteri. Yaman bersatu tersebutlah yang saat ini dikenal sebagai Republik Yaman.

Belum lama berdiri, pada tahun 1992 terjadi kerusuhan pangan. Kerusuhan ini memicu terbentuknya pemerintahan koalisi baru yang terdiri dari partai-partai berkuasa di kedua negara bekas Yaman, yang menyebabkan pemerintahan PM Haydar menjadi tidak efektif. Negosiasi untuk mengakhiri kebuntuan politis berlanjut hingga 1994 (U. S. Department of State, 2011). Secara *de facto* Yaman kembali terpecah menjadi dua bagian, utara dan selatan. Pada 20 Februari 1994 di Amman, Yordania ditandatangani kesepakatan damai antara faksi utara dan selatan. Namun kesepakatan ini tidak berarti apapun untuk menghentikan pertikaian yang telah berkembang menjadi perang saudara.

Pada tahun 1999 diadakan pemilihan presiden secara langsung yang dimenangkan oleh Ali Abdullah Saleh secara telak dengan perolehan suara 96,2% atas satu-satunya pesaing, Najeeb Qathan al-Sha'abi. Juni 2004, pemberontakan Syi'ah di Yaman terjadi dengan Hussein Badreddin al-Houthi, yang juga merupakan pemimpin sekte Zaidiyah, sebagai pemimpin pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Salah satu yang menjadi dalih pemberontakan ini adalah, para pemberontak mempertahankan komunitas mereka dari diskriminasi dan agresi pemerintah (BBC, 2008). 27 September 2006 untuk ke-dua kalinya Saleh dilantik sebagai presiden Republik Yaman setelah kembali memenangkan yang digelar pada 20 September di tahun yang sama. Saleh kembali memperoleh suara terbanyak dengan 77,2%, unggul dari pesaingnya Faishal bin Shamlan yang hanya memperoleh suara sebanyak 21,8% (President Saleh Website, 2007).

Krisis politik di Republik Yaman dimulai pada 2011 ditandai dengan revolusi terhadap pemerintahan Presiden Saleh. Setelah Saleh meletakkan jabatan kepresidenan pada tahun 2012 sebagai bagian dari perjanjian antara

pemerintah Yaman dan kelompok-kelompok oposisi, Abd. Rabbuh Mansur Hadi (yang sebelumnya merupakan Wakil Presiden) menjabat sebagai pemimpin pemerintahan (Johnsen, 2015). Pada tahun 2014, pasukan Houthi menyerbu ibu kota Sana'a dan memaksa Hadi untuk menegosiasikan pemerintah persatuan dengan faksi-faksi politik lainnya. Para pemberontak terus memberikan tekanan pada pemerintahan yang kian melemah. Setelah istana kepresidenan dan kediaman pribadinya diserang kelompok Houthi, Hadi mengundurkan diri bersama para menteri pada bulan Januari 2015. Bulan berikutnya, Houthi menyatakan bahwa mereka mengendalikan, membubarkan parlemen dan membentuk Komite Revolusi sementara yang dipimpin oleh Mohammed Ali al-Houthi. Hadi melarikan diri ke Aden, di mana ia tetap menyatakan diri sebagai presiden Yaman yang sah, mengumumkan ibu kota sementara, dan menyerukan pejabat pemerintah dan anggota militer yang setia untuk bersatu dengannya (AA, 2015).

Gerakan Houthi yang telah melancarkan pemberontakan sejak tahun 2004 memulai pengambilalihan paksa Yaman secara bertahap. Pada tahun 2014 Houthi mengalahkan pasukan pemerintah pada Pertempuran Amran dan Pertempuran Sana'a. Houthi menyerang Aden pada Maret 2015 dan selanjutnya terus bergerak ke distrik Tawahi, Khormaksar, Crater. Keadaan berubah pada pertengahan Juli tahun 2015, ketika serangan balik anti-Houthi berhasil menjebak Houthi di semenanjung. Pada tanggal 6 Agustus 2015, pemerintah Hadi telah merebut 75% dari Taiz, dan pemberontakan Lahij telah mengusir Houthi dari Kegubernuran Lahij. Keberuntungan Hadi sirna pada tanggal 16 Agustus, ketika pasukan Houthi berhasil melakukan serangan balik dan memaksa pasukan Hadi mundur dari Taman Al-Salih dan wilayah Pegunungan Al-Dabab. Pasukan Hadi

menghubungkan kemunduran ini dengan kurangnya peralatan militer (AA, 2015).

Pada tahun 2016 pemerintah Hadi berhasil mengalahkan pasukan Houthi dalam Pertempuran *Port Midi*, dan merebut kembali Mukalla dari *Al Qaeda in Arabian Peninsula/AQAP* dalam pertempuran Mukalla (Hensch, 2017). Setelah kehilangan dukungan dari koalisi yang dipimpin oleh Saudi, Abd. Rabbuh Mansur Hadi mengundurkan diri dan pada April 2022 Dewan Kepemimpinan Presiden (*Presidential Leadership Council/PLC*) mengambil alih kekuasaan (MEMO, 2022). PLC adalah badan eksekutif pemerintah Yaman yang diakui secara internasional. Badan ini beranggotakan delapan orang, diketuai oleh Rashad Muhammad al-Alimi. Kekuasaan presiden dan wakil presiden telah beralih ke badan ini, termasuk kepemimpinan militer serta penunjukkan gubernur dan pejabat penting lainnya (Ardemagni, 2022).

Di bawah kekuasaan PLC saat ini, mengacu kepada rilis PBB tertanggal 18 Desember 2023, Yaman termasuk satu dari 45 negara yang terdaftar sebagai *Least Developed Countries* (LDCs) atau negara-negara kurang berkembang. Dalam definisi LDC menurut PBB, *Least Developed Country* adalah negara kurang berkembang dengan penghasilan rendah yang menghadapi hambatan struktural yang parah terhadap pembangunan berkelanjutan. Negara tersebut sangat rentan terhadap guncangan ekonomi dan lingkungan hidup serta memiliki tingkat aset manusia yang rendah (United Nations, 2024). *Gross National Income* (GNI) per kapita negara Yaman hanya 350 US\$ berdasarkan *triennial review* tahun 2024 (United Nations, 2024). Angka ini jauh merosot dari data yang dihimpun oleh Bank Dunia, yang terakhir tercatat pada 2018 dengan GNI sebesar 820 US\$ (World Bank Group, 2024), sementara

Pendapatan Domestik Bruto hingga akhir tahun 2023 hanya mencapai 21.05 miliar US\$ (Trading Economics, 2024).

Kondisi perekonomian yang cukup mencemaskan tersebut tidak lebih baik daripada situasi politik dan keamanan dalam negeri Yaman yang masih tidak stabil sebagai *impact* perang saudara yang telah berlangsung sejak 2014. Meskipun upaya damai antar pihak yang berseteru terus diupayakan, rekonstruksi berbagai struktur bukan perkara yang akan langsung terwujud jika terjadi rekonsiliasi.

Satu bidang yang memerlukan perhatian dan investasi signifikan dalam proses rekonstruksi pasca konflik adalah pendidikan. Konflik di negara tersebut telah merusak sistem pendidikan yang sudah rentan. Sekolah-sekolah telah hancur akibat pertempuran darat dan serangan udara, diambil alih oleh kelompok bersenjata dan digunakan sebagai fasilitas pelatihan, dan digunakan kembali untuk menampung para pengungsi internal. Banyak guru sekolah negeri yang tidak menerima gaji selama bertahun-tahun, yang menyebabkan eksodus dari profesi tersebut dan rasio siswa-guru yang sangat tinggi. Angka anak-anak yang tidak terdaftar, dan terutama perempuan dan anak perempuan muda, telah meroket di tengah kekerasan tersebut. Pihak-pihak yang bertikai telah merekrut ribuan anak-anak ini untuk bergabung dengan pasukan mereka (Kochenburger, 2023).

*The Euro-Mediterranean Human Rights Monitor* melaporkan bahwa hingga Februari 2021, sejak 2014 pemberontak Houthi telah merekrut secara paksa 10.300 anak untuk dimiliterisasi kemudian ditempatkan di wilayah-wilayah yang dikuasainya. Kurun Juli hingga Agustus 2021 saja terdokumentasi 111 anak tewas di medan pertempuran (reliefweb.int, 2021). Selain korban jiwa dari kalangan anak-

anak usia sekolah, hingga Juli 2021 *Yemen Education Cluster* memperkirakan bahwa konflik di negara tersebut telah berdampak langsung pada lebih dari 2.300 sekolah di Yaman. Sebagian besar sekolah tersebut tidak lagi digunakan (Kochenburger, 2023).

Menurut perkiraan UNICEF, ketika sekolah-sekolah kembali dibuka pada 2015, 1.000 sekolah rusak dan 184 bangunan sekolah digunakan sebagai tempat pengungsian (Transfeld, 2021). Tekanan lainnya pada sistem pendidikan di Yaman saat ini adalah krisis gaji. Hingga September 2017, sebanyak 12.240 sekolah tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar karena para guru meninggalkan profesi mereka sebagai bentuk protes atas gaji yang belum dibayar (Shukri, 2017). Organisasi *Save The Children* memperkirakan bahwa lebih dari 50% guru di Yaman belum menerima gaji tetap sejak tahun 2016 (Kochenburger, 2023).

Pandemi COVID-19 memaksa sekolah tutup selama sebagian besar tahun ajaran 2019-2021, mengganggu pendidikan hampir 5,8 juta siswa termasuk 2,5 juta anak perempuan. Dua juta anak tidak bersekolah sebelum pandemi COVID-19. Pengungsian berganda, sekolah yang jauh, keselamatan dan keamanan termasuk bahaya ledakan, kurangnya guru perempuan (80% laki-laki) dan minimnya fasilitas WASH (*water, sanitation and hygiene*) yang peka gender dan mudah diakses merupakan faktor pendorong meningkatnya kerentanan. Anak perempuan yang putus sekolah berisiko mengalami pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga, sementara anak laki-laki berisiko lebih tinggi direkrut ke dalam kelompok bersenjata (UNICEF, 2021).

## METODE PENELITIAN

Proses penulisan jurnal berbasis data penelitian kualitatif yang dikumpulkan dengan

menggunakan teknik analisis dokumen. Data penelitian kualitatif menurut Utama (Nasution, 2023) dapat diartikan sebagai data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan narasi, dan gambar. Menurut Nasution (2023), data penelitian kualitatif yang didapat melalui teknik analisis dokumen dapat berupa dokumen pribadi, dokumen resmi, dokumen budaya populer, fotografi dan film, foto temuan, dan foto hasil temuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan adalah proses kebudayaan seumur hidup yang meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan terus berkembang dan senantiasa menghadapi perubahan zaman. Oleh karena itu, suka atau tidak suka, pendidikan harus diatur mengikuti ritme perubahan. Jika pendidikan tidak diatur mengikuti ritme perubahan, maka pendidikan itu bergantung pada laju perkembangan zaman tersebut. Pendidikan masyarakat harus selaras dengan ritme kebutuhan dan perubahan masyarakat. Contohnya dalam perkembangan sosial agraris, pendidikan dirancang untuk menyesuaikan ritme perkembangan peradaban sosial agraris dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Demikian pula dalam peradaban industrialisasi dan masyarakat informasi, pendidikan dirancang sesuai ritme perubahan dan kebutuhan sosial seperti industrialisasi dan era informasi. Siklus inilah yang mengembangkan perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan. Di sisi lain, pendidikan akan tertinggal dari perubahan zaman dengan cepat. Oleh karena itu, perubahan dalam pendidikan mesti disesuaikan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat tersebut dari aspek lembaga pendidikan dan tujuannya (Khoiruddin, 2018).

Sebelum 1960-an, sistem pendidikan di Republik Arab Yaman terbatas terutama pada pendidikan agama. *Kuttab* ("sekolah" Islam yang biasanya berada di dalam masjid) dapat ditemukan di setiap kota besar dan sebagian besar kota kecil. Bentuk pendidikan ini sangat eksklusif, dengan hanya sekitar 5% anak muda yang hadir. Setelah terjadi kudeta pada 1962, pemerintahan militer dengan pandangan sekuler mengambil alih kekuasaan dan mulai mengubah dan mensekulerkan sistem pendidikan secara dramatis. Mesir, yang memiliki pasukan dan penasihat di negara tersebut selama sebagian besar konflik internal antara kaum republikan dan kaum royalis yang terjadi selama periode 1962-1970, memberikan bantuan yang cukup besar. Lebih dari 50 sekolah didirikan, termasuk sekolah kejuruan. Topik-topik baru diajarkan untuk pertama kalinya secara formal, seperti matematika, bahasa Inggris, dan ilmu sosial dan alam. Untuk pertama kalinya pula, sekolah untuk anak perempuan didirikan di kota-kota besar Sana'a, Ta'izz, al-Baydha (education.stateuniversity.com, 2024)

Tahun 1970-an dan 1980-an pendidikan sekuler berkembang secara dramatis dan menjadi lebih mudah diakses. Kementerian Pendidikan didirikan, setelah dekrit tahun 1963 oleh pemerintah militer, untuk memantau sistem sekolah umum. Sepanjang periode republik (1962-1990), sekolah-sekolah agama terus beroperasi, dan beberapa sekolah swasta juga didirikan. Sistem sekolah mencakup enam tahun pendidikan dasar, tiga tahun persiapan, dan tiga tahun pendidikan menengah, diikuti oleh studi tersier di universitas atau di luar negeri. Pendidikan dasar berkisar pada keterampilan dasar, persiapan pada keterampilan praktis dan kejuruan, dan menengah pada salah satu dari lima pilihan: umum (seni dan sains), kejuruan, komersial, pertanian, dan pelatihan guru (education.stateuniversity.com, 2024).



Langkah pertama dan terpenting dalam mengembangkan sistem pendidikan tinggi pribumi adalah pembentukan Universitas Sana'a pada tahun 1970, yang tetap menjadi satu-satunya universitas *Yemen Arab Republic* (YAR) sampai bergabung dengan Republik Yaman pada tahun 1990. Universitas ini didirikan dengan bantuan Kuwait dan awalnya kecil; pada saat pembentukan, hanya memiliki 61 mahasiswa dan 15 staf di tiga perguruan tinggi (hukum, sains dan seni). Universitas ini dipimpin oleh Menteri Pendidikan sebagai Presiden Universitas dan termasuk Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab atas operasi sehari-hari. Pada akhir 1970-an sekolah menambahkan perguruan tinggi ekonomi dan pendidikan. Universitas tumbuh hingga berjumlah lebih dari 5.000 mahasiswa pada akhir 1980-an. Beasiswa pemerintah dibuat bersama dengan universitas untuk membantu siswa belajar di luar negeri untuk gelar yang tidak tersedia di Universitas Sana'a ([education.stateuniversity.com](http://education.stateuniversity.com), 2024).

Ketergantungan pada guru asing di bawah Inggris membuat Yaman Selatan berada dalam situasi sulit setelah mereka mengklaim kemerdekaan mereka pada tahun 1967. Pendidikan diperluas secara dramatis dan akses ke sana sangat meluas setelah waktu itu. Tingkat sekolah menengah sebenarnya cukup fleksibel dengan pilihan alternatif seperti program kejuruan dua tahun atau program sekolah menengah khusus lima tahun. Pendidikan tidak wajib, tetapi kehadirannya cukup banyak dan meluas, sangat berbeda dengan periode sebelumnya. Anak perempuan kurang terwakili dalam pendidikan dengan pendaftaran sekolah dasar perempuan sekitar 20 hingga 25 persen pada tahun 1970-an dan meningkat menjadi sekitar 35 hingga 40 persen pada tahun 1980-an ([education.stateuniversity.com](http://education.stateuniversity.com), 2024).

Sistem pendidikan sepenuhnya gratis di semua tingkatan, dengan anak-anak diberikan buku pelajaran dan transportasi gratis. Di daerah pedesaan tanpa sekolah, siswa juga diberikan asrama gratis. Di tingkat universitas, siswa juga diberikan tunjangan bulanan yang setara dengan sekitar setengah dari gaji rata-rata. Tingkat pendidikan tinggi hanya terdiri dari satu universitas, Universitas Aden, yang dibuka pada tahun 1975. Enam fakultas didirikan di bidang pertanian, hukum, ekonomi, pendidikan, teknologi, dan kedokteran. Beberapa mahasiswa juga belajar di luar negeri, sebagian besar di Uni Soviet dan Eropa Timur, tetapi juga di negara-negara Arab lainnya. Pendidikan tinggi lainnya disediakan melalui lembaga pelatihan guru, yang melengkapi pelatihan guru di Universitas Aden. Lulusan lembaga pengajaran dapat langsung mengajar di tingkat yang lebih rendah dengan Sekolah Tinggi Pendidikan yang menyediakan pelatihan lebih lanjut untuk mengajar di tingkat menengah. Kementerian Pendidikan juga menyediakan pelatihan. Dalam kedua kasus tersebut, pengalaman praktis dimasukkan dalam kurikulum ([education.stateuniversity.com](http://education.stateuniversity.com), 2024).

Menilik ke belakang sebelum terjadi konflik yang hingga hari ini masih berkecamuk, pemerintah Republik Yaman memiliki *wants* serta *effort* yang cukup besar dalam memajukan pendidikan di berbagai tingkatan. Sebelum penyatuan Yaman pada tahun 1990, pendidikan di negara tersebut mengalami perkembangan kualitatif kumulatif yang signifikan. Namun, pasca-penyatuan, terjadi kebangkitan nyata dalam hal kuantitatif, yang disandingkan dengan kemerosotan kualitas yang tajam. Angka pendaftaran di pendidikan pra-dasar tetap sangat rendah, tidak melebihi 2% untuk anak-anak di negara yang 40% penduduknya berusia di bawah 14 tahun. Hanya 13% orang dewasa Yaman yang memiliki beberapa jenis

pendidikan, belajar di sekolah-sekolah yang 53% tidak memiliki fasilitas sanitasi atau air. Rasio paritas gender adalah 69 anak perempuan untuk setiap 100 anak laki-laki, dan pengeluaran pemerintah untuk siswa sekolah menengah hanya berjumlah \$471 per tahun (Global Education Monitoring Report, 2016).

Pada Artikel 54 Konstitusi Republik Yaman yang diamandemen di tahun 2015, disebutkan bahwa, *“Education is a right for all citizens. The state shall guarantee education in accordance with the law through building various schools and cultural and educational institutions. Basic education is obligatory. The state shall do its best to obliterate illiteracy and give special care to expanding technical and vocational education. The state shall give special attention to young people and protect them against perversions, provide them with religious, mental and physical education, and the appropriate environment to develop their aptitude in all fields”* (Constitution of the Republic of Yemen, 2020).

Berdasarkan Konstitusi Republik Yaman, pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara. Negara menjamin pendidikan sesuai dengan undang-undang melalui pembangunan berbagai sekolah dan lembaga kebudayaan dan pendidikan. Pendidikan dasar adalah wajib. Negara harus melakukan yang terbaik untuk memberantas buta huruf dan memberikan perhatian khusus pada perluasan pendidikan teknik dan kejuruan. Negara memberikan perhatian khusus kepada generasi muda dan melindungi mereka dari penyimpangan, membekali mereka dengan pendidikan agama, mental dan jasmani, serta lingkungan yang cocok untuk mengembangkan bakat mereka di segala bidang.

Untuk memanifestasikan amanat konstitusional pada Artikel 54 Konstitusi Republik Yaman, pemerintah Yaman menyusun beberapa perencanaan strategis disertai rangkaian paket aksi di bidang pendidikan. Beberapa strategi pemerintah Yaman terhadap sektor pendidikan terlihat sebagaimana dapat dijumpai pada laporan *The Development of Education In The Republic Of Yemen* yang disampaikan pada Konferensi Pendidikan Internasional ke-48. Kendati dalam situasi yang tidak menentu, rencana pembangunan sektor pendidikan tidak mengalami kesurutan (meskipun mungkin akan terlihat hasil yang tidak sebanding pada kenyataan) sebagaimana tertuang dalam dokumen Kementerian Pendidikan Yaman *Mid Term Results Framework* (MTRF) 2013-2015. Dengan pertimbangan atas situasi dalam negeri Yaman, pada 2019 Pemerintah Republik Yaman mencanangkan *Transitional Education Plan 2019/20-2021/22*.

Meskipun krisis politik sedang terjadi di Yaman, akan tetapi tidak sedikit pelajar internasional yang tetap tinggal di negara tersebut untuk belajar dan selama krisis sangat sedikit pelajar internasional yang meninggalkan negara tersebut. Khususnya pelajar internasional yang datang ke Yaman untuk belajar agama (Hazhami, 2023). Dari Indonesia saja, menurut Duta Besar Republik Yaman untuk Indonesia, Abdulghani Nassr Ali al-Shamiri, menyampaikan bahwa saat ini tidak kurang dari empat ribuan pelajar Indonesia tengah melanjutkan pendidikannya di Republik Yaman. Mereka, lanjut Dubes, rata-rata belajar di Darul Mustofa, Tarem atau pun Universitas Hadramaut (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020).

Di Yaman, jenjang pendidikan mencakup sembilan tahun pendidikan dasar wajib dan tiga

tahun pendidikan menengah. Pendidikan dasar bersifat wajib dan gratis serta berlangsung selama sembilan tahun. Usia yang lazim untuk memulai pendidikan adalah enam tahun, yang berarti bahwa siswa umumnya mendaftar di sekolah dasar dari usia 6 hingga 14 tahun dan kemudian sekolah menengah dari usia 15 hingga 17 tahun. Pendidikan menengah menerima siswa yang telah berhasil memperoleh sertifikat pendidikan dasar. Lamanya studi adalah tiga tahun, dan menurut hasil di tahun pertama, siswa di tahun kedua diarahkan ke jalur ilmiah atau sastra. Siswa juga dapat melanjutkan pendidikan menengah teknik dan kejuruan untuk memperoleh yang setara dengan sekolah menengah umum. Undang-Undang 45 tahun 1992 dan Konstitusi tahun 2015 menetapkan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang dijamin oleh Negara dan diberikan kepada semua warga negara. Pada tahun 2015, sekolah pemerintah menyumbang 94,8% dari penyediaan pendidikan. Pada tahun 2020, jumlah siswa yang terdaftar di pendidikan publik sekitar 6 juta, termasuk 4.940.829 di pendidikan dasar dan 690.326 di pendidikan menengah (education-profiles.org, 2021).

## **1. Strategi Pendidikan dalam Yemen Strategic Vision 2025**

Pemerintah Republik Yaman sebenarnya telah merancang Visi Strategis Yaman 2025 (*Yemen Strategic Vision 2025*). Visi strategis tersebut bertujuan untuk meningkatkan tingkat pembangunan manusia selama 25 tahun mendatang (2000-2025) sehingga Yaman menjadi salah satu negara berkembang menengah dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan individu serta menjamin kehidupan yang terhormat bagi mereka (Ministry of Education, 2008).

Untuk mencapai tujuan itu diperlukan peningkatan status demokrasi, kesehatan, pemberantasan buta huruf dan meningkatkan partisipasi dalam pendidikan dasar khususnya di kalangan perempuan, selain itu, meningkatkan pendapatan per kapita individu ke tingkat pendapatan per kapita menengah yang terkait dengan verifikasi sumber daya produksi lokal daripada bergantung sepenuhnya pada reproduksi minyak dan gas alam melalui identifikasi sumber daya pertumbuhan dan sektor-sektor yang menjanjikan serta penciptaan lapangan kerja dan mencapai dorongan kuat dalam ekspor (Ministry of Education, 2008).

Sistem pendidikan dan pelatihan di Republik Yaman bekerja berdasarkan serangkaian strategi sektoral yang mengidentifikasi tujuan kuantitatif dan kualitatif untuk setiap subsektor. Strategi-strategi tersebut adalah (Ministry of Education, 2008):

### **1.1. Strategi Nasional Pemberantasan Buta Huruf dan Pendidikan Orang Dewasa** (*The National Strategy of Illiteracy Eradication and Adult Education*)

Upaya pemberantasan buta huruf dan pendidikan orang dewasa berfokus pada kebijakan sebagai berikut:

- Memastikan kewajiban pendidikan dan menutup sumber penyebab buta huruf.
- Membuka pusat-pusat pemberantasan buta huruf dan pendidikan orang dewasa di kawasan pemukiman perkotaan maupun pedesaan.
- Mendorong pendaftaran program pemberantasan buta huruf dan pendidikan orang dewasa serta meningkatkan jumlah yang telah



mendaftar baik di daerah perkotaan maupun pedesaan terutama perempuan melalui pemberian insentif pangan dan hal-hal lainnya.

- Mengembangkan pemberantasan buta huruf dan pendidikan orang dewasa baik dalam dimensi fungsional maupun abjad serta melaksanakan program pelatihan dan penyegaran bagi staf di bidang pelatihan dan pengajaran.
- Memverifikasi dan memperbarui program pelatihan dasar dan bagi perempuan sebelumnya yang memungkinkan mereka untuk memperoleh pengetahuan teknis dan keterampilan hidup yang membantu perempuan pedesaan untuk berintegrasi dalam pasar tenaga kerja dan menjadi mandiri, terutama perempuan miskin.
- Partisipasi dewan lokal, LSM, dan masyarakat lokal dalam membuka kelas pemberantasan buta huruf dan pendidikan orang dewasa, juga memungkinkan peran media yang berbeda untuk meningkatkan kesadaran akan risiko di balik buta huruf.
- Melaksanakan program pemberantasan buta huruf bagi masyarakat yang terafiliasi dalam asosiasinya oleh badan sipil dan non sipil pemerintah.
- Menyediakan guru dan pelatih, terutama perempuan untuk memenuhi kekurangan dan meningkatkan tingkat pendapatan mereka.

- Meningkatkan mekanisme koordinasi dengan Kementerian Pendidikan untuk membatasi fenomena putus sekolah (rencana lima tahun ketiga).

## 1.2. Strategi Nasional Pembangunan Pendidikan Dasar (*The National Strategy of Basic Education Development*)

Pemerintah telah meratifikasi Strategi Pengembangan Pendidikan Dasar Nasional 2003 yang bertujuan untuk mereformasi dan mengembangkan sistem pendidikan dasar untuk menyediakan kesempatan pendidikan dasar berkualitas tinggi yang sama untuk setiap siswa Yaman di usia 6-14. Dari segi kuantitas, ambisi dari strategi ini adalah untuk memberikan pendidikan dasar bagi 95% anak-anak Yaman pada usia [6-14], dan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dan daerah perkotaan dan pedesaan pada tahun 2015. Program dan kegiatan strategi berfokus pada hal-hal berikut:

- Mengembangkan tingkat cakupan dengan tujuan memberikan pendidikan dasar untuk 95% dari kategori usia 6-14, mengurangi kesenjangan antara anak laki-laki dan perempuan, kategori perkotaan, pedesaan dan marjinal, dengan meningkatkan pendaftaran anak berkebutuhan khusus dengan cara yang dapat membuat kita berkonsentrasi pada status khusus anak berkebutuhan khusus dan anak di bawah marjinal. Juga memberikan perhatian khusus pada kurikulum anak berkebutuhan khusus, dan mendistribusikan sumber daya pendidikan antar provinsi dan

kabupaten yang menjamin penyebaran pendidikan sesuai dengan kriteria yang memenuhi kriteria kesetaraan.

- Mengembangkan kualitas pendidikan dasar dan menjadikan siswa dan guru sebagai vokal sistem pendidikan dan masyarakat, dengan meningkatkan kinerja guru pendidikan dasar, meningkatkan tingkat kualifikasi dan kompetensi administrasi sekolah, mengembangkan kurikulum untuk tahap pendidikan dasar, menghilangkan kepadatan kelas dan menyediakan perabotan sekolah, mengaktifkan saluran komunikasi antara lembaga pendidikan dan masyarakat, mendorong sektor swasta dalam memperluas sistem pendidikan prasekolah di semua bidang. Melaksanakan pengembangan kualitatif dalam peran dan metodologi bimbingan pendidikan untuk menjadi pemimpin dan pengawas proses perubahan yang ditargetkan dan restrukturisasi anggaran untuk mengaktifkan sisi kualitatif.
- Meningkatkan efisiensi pendidikan dan pendidikan terdesentralisasi dengan memperkuat dan mendukung struktur teknis dan kelembagaan di kantor pendidikan gubernur dan kabupaten, memperbaiki dan mendukung struktur hukum partisipasi masyarakat dalam pendidikan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi ini bagi semua pihak yang terkait, mengurangi pemborosan pendidikan dengan mendistribusikan kembali tenaga kerja yang menganggur atau sebagian bekerja. Meningkatkan pendanaan

untuk pendidikan dasar dan verifikasi sumbernya, dan mengurangi limbah pendidikan yang merupakan akibat dari perbaikan dan putus sekolah.

### 1.3. Strategi Nasional Pengembangan Pendidikan Menengah (*The National Strategy of Secondary Education Development*)

Pemerintah Yaman telah menyetujui Strategi Pendidikan Menengah Nasional 2006 yang berupaya memberdayakan Yaman untuk memiliki fitur pendidikan menengah umum dengan keadilan dan pemerataan dalam memberikan kesempatan pendidikan dan pendidikan yang berkualitas, serta verifikasi domain yang memungkinkan lulusan untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau mengikuti kehidupan kerja. Strategi ini juga bertujuan untuk menyediakan pendidikan menengah umum untuk hasil pendidikan dasar, yang memenuhi keadilan dan kesetaraan dalam pendaftaran dan pendidikan berkualitas dan verifikasi dalam domain untuk mencapai perkiraan tingkat kelulusan 56% pada tahun 2015. Strategi ini berfokus pada:

- a. Perluasan dan penyebaran melalui:
  - Perbaruan survei pemetaan sekolah dan jaminan yang mencakup semua kegubernuran di Republik Yaman.
  - Melaksanakan kampanye kesadaran umum, terutama pendidikan anak perempuan di daerah sasaran yang akan dipilih sesuai dengan hasil survei pemetaan sekolah.

- Membangun sekolah baru dan memperluas dan memelihara yang sudah ada, menyediakan furnitur dan fasilitas yang sesuai dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus.
  - Memberikan insentif untuk meningkatkan pendaftaran dan retensi perempuan di sekolah terutama di daerah pedesaan.
  - Mengembangkan dan menerapkan intervensi yang bertujuan untuk mengurangi tingkat repetition dan putus sekolah.
  - Mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam pendidikan menengah umum.
- b. Meningkatkan tingkat mutu pendidikan menengah umum melalui:
- Mempertimbangkan kembali verifikasi pendidikan menengah umum saat ini dengan memanfaatkan pengalaman regional dan internasional, yang mengarah pada harmonisasi dengan kebutuhan siswa dan memungkinkan mereka untuk bergabung dalam kehidupan kerja.
  - Mengembangkan dan menguji coba kurikulum sekolah baru yang menerjemahkan keterampilan, kompetensi dan pengetahuan yang diperlukan untuk diperoleh.
  - Mengembangkan program pelatihan dalam jabatan untuk guru yang sesuai dengan kurikulum baru dan menyetujui verifikasi pendidikan menengah umum.
- Mengembangkan program pelatihan prajabatan untuk melatih guru yang sesuai dengan kurikulum baru dan verifikasi yang disetujui dari pendidikan menengah umum.
  - Mengembangkan sistem untuk mengevaluasi prestasi pendidikan yang sesuai dengan kurikulum baru dan verifikasi yang disetujui untuk pendidikan menengah umum.
- c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan efisiensi sistem pendidikan menengah umum di semua tingkatan (Kementerian Pendidikan, gubernuran, kabupaten dan masyarakat) melalui:
- Memperkuat sistem informasi pendidikan.
  - Membangun lingkungan sekolah yang memungkinkan administrasi sekolah ditingkatkan di semua tingkatan.
  - Menerapkan program untuk memberikan otoritas ke tingkat pengambilan keputusan terendah dan menjamin transparansi.
  - Mengembangkan intervensi untuk meningkatkan efisiensi.

#### 1.4. Strategi Nasional Pelatihan Kejuruan dan Pendidikan Teknik (*The National Strategy of Vocational and Technical Education*)

Strategi Nasional Pelatihan Kejuruan dan Pendidikan Teknik ditujukan untuk mencapai keseimbangan antara pendidikan menengah dan universitas di satu sisi dan pelatihan kejuruan dan

pendidikan teknis di sisi lain, dan mempromosikan pelatihan kejuruan dan program dan kurikulum pendidikan teknis serta meningkatkan efektivitas dan efisiensinya. Strategi ini diupayakan untuk memenuhi tujuan berikut:

1. Mencapai keseimbangan yang proporsional antara pendidikan menengah umum dari satu sisi dan pelatihan vokasi dan pendidikan teknik dari sisi lain melalui peningkatan kapasitas pelatihan kejuruan dan pendidikan teknis menjadi 7% dari total pendaftaran pendidikan menengah pada tahun 2010.
2. Memperluas pelatihan kejuruan dan pendidikan teknis secara vertikal dan horizontal, dan meningkatkan jumlah pusat dan lembaga dan perguruan tinggi komunitas menjadi 145 institusi pada tahun 2010.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan setelah itu akan diikuti:

- Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi untuk sektor pelatihan vokasi dan pendidikan teknik, dan merestrukturisasinya untuk menjawab kebutuhan pelatihan bagi sektor bisnis dan masyarakat.
- Memperluas perguruan tinggi, lembaga kejuruan dan teknis dan komunitas dan memulihkan yang sudah ada.
- Mendorong sektor swasta untuk berkontribusi dalam mendirikan dan membekali lembaga kualitatif.

- Memperluas kemitraan di antara sektor pelatihan, tenaga kerja dan produksi untuk menyelaraskan antara peluang pelatihan dan persyaratan operasi.
- Melanjutkan pengembangan kurikulum pelatihan kejuruan dan pendidikan teknis agar sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan verifikasi pengalaman teknis dengan kompetensi dasar dan keterampilan umum, dan membuka jalur yang nyaman dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, termasuk sistem teknologi informasi. Penting juga untuk menyediakan suku cadang yang digunakan dalam pelatihan.
- Mendirikan lembaga dan domain kualitatif yang cocok untuk perempuan, dan mendorong pendaftaran perempuan dalam pelatihan kejuruan dan pendidikan teknis.
- Mendirikan lembaga pelatihan kejuruan khusus untuk membuat mereka yang tinggal di daerah pedesaan memperoleh keterampilan yang memungkinkan mereka untuk bergabung dengan pasar tenaga kerja.
- Menyiapkan program terarah bagi pengangguran dan program pelatihan transfer untuk menyerap surplus angkatan kerja dengan mengobati kekurangan di beberapa karir terutama bengkel pemeliharaan dan perlengkapan peralatan.
- Memperluas sistem pendidikan kooperatif untuk meningkatkan kinerja staf dan memudahkan

penerimaan orang miskin, dan mengintegrasikan orang-orang berkebutuhan khusus dalam program pelatihan kejuruan dan pendidikan teknis.

- Mempromosikan tingkat karir dan kapasitas ilmiah untuk melatih kader melalui program khusus, dan berkoordinasi dengan universitas untuk memenuhi syarat guru dan pelatih pendidikan pelatihan kejuruan, dan memulai domain yang mempersiapkan kader untuk mengajar di lembaga dan pusat pelatihan kejuruan dan pendidikan teknis, selain itu, mengirim yang terhormat untuk memperbarui pengetahuan mereka, dan menggunakan insentif yang sesuai untuk menarik kader yang berkualitas.
- Memperhatikan program profesional, pendidikan, bimbingan dan kesadaran serta meningkatkan perspektif sosial terhadap pelatihan vokasi dan pendidikan teknis.
- Mengintegrasikan konsep kependudukan dan lingkungan dalam kurikulum pelatihan kejuruan dan pendidikan teknis.
- Penggunaan saluran pendidikan dalam menyebarluaskan pendidikan teknis dan pelatihan vokasi serta budayanya.
- Mengaktifkan peran pelatihan kejuruan dan dana teknologi, dan memverifikasi sumber daya pendanaan, dan meningkatkan tren partisipasi penerima manfaat dalam penetapan biaya.

- Memotivasi sektor swasta untuk mendanai pelatihan mereka yang mencari pekerjaan dan membiarkan mereka memperoleh keterampilan yang memperluas peluang mereka untuk mencari pekerjaan.
- Memberikan layanan konsultasi, dan pemasaran produksi pelatihan praktis, dan mendapatkan manfaat dari peserta pelatihan untuk membuat karya seni untuk sektor swasta, dengan mengatur pendapatan dan meningkatkan efisiensi pengeluaran.
- Memfasilitasi untuk mendapatkan pinjaman mudah bagi mereka yang telah lulus dari pelatihan kejuruan dan pendidikan teknis untuk membuat proyek kecil.

### 1.5. Strategi Nasional Pendidikan Tinggi (*The National Strategy of Higher Education*)

Strategi Nasional Pendidikan Tinggi 2006 bertujuan untuk menciptakan sistem bagi fitur pendidikan tinggi dengan kualitas dan partisipasi yang luas, dan jalur ganda baik secara horizontal maupun vertikal yang menjamin verifikasi dan yang ditandai dengan efisiensi dan menyajikan program kualitatif, dan memenuhi kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk kualitas hidup yang lebih baik. Strategi ini juga memiliki ambisi untuk memperluas penerimaan bagi siswa di universitas dan lembaga pendidikan tinggi dari usia 19-23 menjadi 35% pada tahun 2025.

Kebijakan dan prosedur yang ditempuh adalah:



- Menyusun kembali Kementerian Pendidikan Tinggi dan Penelitian Ilmiah serta lembaga pendidikan yang terkait dengannya. Dan mengembangkan kapasitas kelembagaannya di tingkat nasional dan universitas untuk memungkinkan mereka meningkatkan kinerja dan meningkatkan efektivitas mereka untuk memenuhi tujuan yang diharapkan.
- Mengembangkan undang-undang dan menetapkan filosofi meliputi perubahan yang sejalan dengan reformasi proses pendidikan, dan meningkatkan outputnya dan berkontribusi dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan dan memverifikasi sumber daya dana.
- Mengaktifkan peran dewan pendidikan tinggi dalam menyusun kebijakan dan mengaktifkan mekanisme tindak lanjut pengawasan dengan melengkapi strukturnya untuk menjamin penyelesaian peran dalam bimbingan dan pengawasan.
- Mendukung kapasitas administrasi universitas untuk meningkatkan proses pendidikan, dan memperkuat perencanaan dan pemantauan statistik sehubungan dengan tugas-tugas yang diinginkan dari mereka.
- Mengembangkan pendidikan perguruan tinggi yang memenuhi kebutuhan pembangunan sosial ekonomi, dan membangun sistem ketergantungan akademik dan memasukkan konsep mutu untuk memenuhi kebutuhan pembangunan berkelanjutan dan pasar tenaga kerja lokal dan kebutuhan daerah.
- Meningkatkan verifikasi program pendidikan tinggi dan membatasi duplikasi khas fakultas dan seksi melalui verifikasi program dan struktur pendidikan tinggi baik secara vertikal maupun horizontal dan memperluas pembentukan fakultas dan domain baru kualitatif untuk menyoroti mahasiswa terkemuka dan memperluas kapasitas mereka terutama di bidang ilmu praktis.
- Restrukturisasi fasilitas pendidikan dan transfer sub fasilitas untuk menonaktifkan program yang komprehensif dengan fitur terapan.
- Menyediakan sumber daya yang cukup untuk universitas, penggunaan bimbingan untuk mencapai lebih banyak manfaat bagi masyarakat dan mengidentifikasi dasar distribusi sumber daya di antara universitas berdasarkan program dan kinerja yang menjamin akuntabilitas dan transparansi.
- Fokus pada peningkatan kemampuan lembaga pendidikan tinggi dalam mengembangkan sumber daya mereka.
- Memperdalam partisipasi sektor swasta dalam pengembangan pendidikan tinggi dan fasilitas ilmu terbuka, dan domain baru yang memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja.
- Membangun sistem informasi untuk menghubungkan lembaga pendidikan

tinggi dari satu sisi dengan jejaring nasional, regional dan jejaring internasional dari sisi lain.

- Melanjutkan kebijakan penerimaan sesuai dengan kapasitas yang tersedia, dengan memperhatikan perluasan dalam domain ilmiah dan sains masa depan dan aplikasinya serta memperkuat kapasitas siswa dalam bahasa Inggris, dan mendorong pendaftaran anak perempuan di daerah pedesaan.
- Mengembangkan kurikulum dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sedemikian rupa sehingga mentransfer perguruan tinggi ke masyarakat yang mengembangkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta menghasilkan pengetahuan, memperdalam dan menyebarkanluaskannya serta menggunakannya untuk menangani masalah masyarakat.
- Ekspansi horizontal dan vertikal pada program studi tinggi dengan menetapkan mekanisme peningkatan penelitian ilmiah dan meningkatkan fungsi universitas dalam melayani masyarakat.
- Menyusun strategi nasional untuk penelitian ilmiah.
- Menyiapkan mekanisme praktis untuk koordinasi antara pusat dan otoritas penelitian dan universitas dari satu sisi dan lembaga produktif yang mendapat manfaat dari temuan penelitian ilmiah dari sisi lain.

- Mengembangkan studi dan penelitian yang lebih tinggi di universitas dan mendorong diseminasi dan penerjemahan ilmiah serta meningkatkan publikasi ilmiah, dan memastikan hak kepemilikan.
- Mengaktifkan penelitian ilmiah melalui pemberian konsultasi dan melakukan serangkaian penelitian dan kajian serta mengembangkan teknologi.
- Membangun kemitraan yang efektif antara perguruan tinggi dan pusat penelitian dan lembaga swasta dalam mendanai proyek penelitian ilmiah, terutama penelitian yang berkaitan dengan tantangan pembangunan dan masalah utama.
- Mengembangkan sarana dan prasarana perpustakaan dan fakultas universitas serta memperbarui isinya, dengan memasukkan sistem perpustakaan elektronik.
- Menyediakan peralatan, laboratorium dan menggunakannya dalam aplikasi praktis.
- Mengintegrasikan konsep demografis dan hak asasi manusia dalam kurikulum pendidikan.
- Mengaktifkan pembatasan dan mekanisme staf pengajar dan penunjukan bantuan mereka, identifikasi kebutuhan sehubungan dengan kekurangan yang ada, hadapi perluasan, dan aktifkan mekanisme pemantauan dan evaluasi.

- Meningkatkan kapasitas tenaga pengajar dan pendampingannya melalui penyusunan program penyegaran bagi mereka di dalam dan di luar, memasukkan sistem telekomunikasi informasi dan melatih penggunaannya.
- Menyiapkan mekanisme pengiriman ke luar negeri yang mencakup pembatasan yang jelas yang tergantung pada pentingnya domain dan tidak tersedia di dalam negeri, menghubungkan antara domain yang diperlukan dan kebutuhan pasar tenaga kerja dalam jangka panjang, dan tinjauan berkala untuk menjamin fleksibilitas dan pengembangan yang diperlukan.
- Memperluas peluang pendaftaran di perguruan tinggi bagi masyarakat miskin terutama mahasiswa berprestasi, dan memberikan beasiswa yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

## 2. Pencapaian

Hingga 2015, prospek signifikan dari rencana strategis sektor pendidikan membawa dampak sebagaimana tertuang dalam *Mid Term Results Framework 2013-2015* atau Kerangka Hasil Jangka Menengah 2013-2015 (Ministry of Education, 2015).

1. *The National Basic Development Strategy* (NBEDS) 2003-2015 atau Strategi Pembangunan Pendidikan Dasar Nasional 2003-2015 bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam pendidikan dasar, khususnya bagi anak perempuan dan di daerah pedesaan, untuk mencapai 95 persen anak usia 6–14 tahun di Yaman pada tahun

2015. Strategi ini mendapat tanggapan yang kuat dan dukungan terkoordinasi dari komunitas donor, termasuk tiga fase pendanaan *Education For All* (EFA) – *Fast Track Initiative* (FTI). Pemerintah juga telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam memperkuat lingkungan kebijakan sejak artikulasi NBEDS pada tahun 2003.

2. *The National General Secondary Education Strategy* (NGSES) 2007-2015, atau Strategi Nasional Pendidikan Menengah Umum 2007-2015 yang bertujuan menyediakan pendidikan menengah berkualitas yang adil dan hemat biaya untuk transisi ke pendidikan tinggi dan pasar tenaga kerja. Untuk melaksanakan reformasi kebijakan yang direncanakan berdasarkan NGSES, telah ditandatangani perjanjian formal dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk memastikan komitmen mereka untuk mematuhi reformasi kebijakan terkait perekrutan, penempatan dan pemantauan guru.
3. *The National Strategy for The Development of Vocational and Technical Education* (NSDVTE) 2004-2014 atau Strategi Nasional Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Teknik 2004-2014 bertujuan untuk mencapai keseimbangan yang “memadai” antara pendidikan umum dan *Technical Education and Training* (TVET). Salah satu reformasi kebijakan yang diterapkan di bawah NSDVTE adalah amandemen undang-undang *Social Development Fund* (SDF) pada tahun 2009 untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada SDF dalam menangani pemberi kerja. Untuk melaksanakan strategi ini, pemerintah mendapat dukungan dari sejumlah donor antara lain Arab Saudi, Departemen Pembangunan Internasional (*Department*

*For International Development/DFID*) Inggris, Badan Pembangunan Jerman (*German Development Agency/GIZ*) dan Asosiasi Pembangunan Internasional (*International Development Association/IDA*).

4. *The National Strategy for The Development of Higher Education in Yemen* (NSDHEY) 2006 atau Strategi Nasional Pengembangan Pendidikan Tinggi di Yaman 2006, yang berfokus pada empat bidang reformasi: tata kelola, keuangan, kualitas, dan diversifikasi. Terkait dengan pertumbuhan angka partisipasi sekolah, strategi ini bertujuan untuk memperluas akses terhadap universitas dan institusi pendidikan tinggi lainnya (termasuk TVET), khususnya untuk kelompok usia 19-23 tahun, dari 13 persen menjadi 16 persen pada tahun 2010, dan menjadi 35 persen pada tahun 2025. Salah satu reformasi kebijakan utama yang diterapkan di bawah NSDHEY adalah pembentukan Dewan Tinggi Penjaminan Mutu dan Akreditasi (*High Council for Quality Assurance and Accreditation*). Implementasi NSDHEY mendapat dukungan dari Belanda dan IDA.

5. *The National Children and Youth Strategy* (NCYS) atau Strategi Nasional Anak dan Remaja. NCYS disusun sebagai respons terhadap tantangan dalam mengatasi risiko (khususnya yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan) yang dihadapi anak-anak dan remaja Yaman dalam siklus hidup mereka. Pendekatan ini menggunakan kerangka kerja lintas sektoral yang terintegrasi untuk mengidentifikasi isu-isu dan kesenjangan di sektor-sektor pembangunan manusia yang paling mungkin berdampak pada pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs), dan untuk

mengusulkan rencana aksi untuk diintegrasikan dan dilaksanakan oleh kementerian-kementerian terkait sebagai bagian dari rencana kerja mereka masing-masing program sektor.

Sebagai prioritas MTRF 2013-2015 adalah (Ministry of Education, 2015):

1. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pengembangan keyakinan dan praktik bahwa peserta didik adalah pusat proses belajar mengajar, dan menciptakan lingkungan pengajaran yang berbasis pada hasil belajar siswa. Hal ini memerlukan serangkaian reformasi yang dimulai dengan penyempurnaan kurikulum dasar dan menengah, penetapan hasil pembelajaran untuk setiap kelas dan mata pelajaran, penyempurnaan buku teks dan buku pedoman guru sesuai dengan hasil pembelajaran dan sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di abad kedua puluh satu. Hal ini juga memerlukan pertimbangan kembali metode pelatihan guru untuk meningkatkan keterampilan guru dalam membimbing dan membimbing siswa, dan bukan hanya memberikan informasi kepada siswa, untuk mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik. Lebih lanjut, hal ini memerlukan peran sekolah yang lebih efektif dalam merencanakan dan melaksanakan mutu pendidikan yang lebih baik, dimana sistem akreditasi sekolah diidentifikasi sebagai kebijakan utama Kementerian Pendidikan untuk penjaminan mutu pendidikan.
2. Menutup kesenjangan sosial dan kesenjangan gender melalui sistem

pendidikan yang berkeadilan mampu memberikan kesempatan yang sama sejak dini kepada setiap anak, sehingga mampu bersaing secara adil di pasar tenaga kerja masa depan. Prioritas ini akan mengatasi peningkatan motivasi anak-anak terutama perempuan, dan mendorong keluarga untuk menyekolahkan anak perempuan mereka untuk meningkatkan tingkat retensi siswa perempuan sampai mereka menyelesaikan setidaknya tahap pendidikan umum. Prioritas tersebut juga bertujuan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam menutup kesenjangan ini. Beberapa layanan pendidikan alternatif akan menargetkan anak-anak yang sulit dijangkau dan terutama anak-anak putus sekolah, termasuk para pengungsi internal. Prioritas ini juga bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah dengan menyediakan ruang kelas dan ruang lain termasuk jamban, perabotan dan peralatan yang diperlukan untuk menampung siswa yang terdaftar. Hal ini memerlukan pengembangan sejumlah kebijakan seperti: koordinasi proses pemilihan lokasi sekolah dan gedung di antara semua mitra pembangunan; pengembangan kapasitas sekolah di bidang pemeliharaan dan renovasi; dan akomodasi bagi siswa berkebutuhan khusus serta mereka yang berada di kamp pengungsi, dengan gedung sekolah, perabotan atau peralatan yang diperlukan.

3. Memperkuat kapasitas Kementerian Pendidikan, kantor gubernur dan distrik (*Governate and District Office/GEO*), untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menyediakan layanan

pendidikan yang efisien dan berkualitas tinggi. Program ini mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mengelola dan mengkoordinasikan pemberian layanan pendidikan dengan lebih baik. Hal ini bertujuan untuk memperkuat peran Kementerian Pendidikan dalam berbagai aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Selain itu, upaya meningkatkan harmonisasi mitra pembangunan agar lebih selaras dengan prioritas dan rencana Kementerian Pendidikan serta koordinasi dengan kementerian terkait lainnya. Hal ini akan dicapai dengan menerapkan strategi dan kebijakan yang membantu menyatukan upaya seluruh mitra yang terlibat dalam penyusunan rencana aksi tahunan Kementerian Pendidikan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Salah satu persyaratan pada tahap ini adalah menetapkan kerangka pemantauan dan evaluasi. Hal ini akan dilakukan melalui peningkatan tinjauan tahunan bersama (*Joint Annual Review/JAR*), serta penguatan nasional dan penerapan serta penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (*Education Management Information System/EMIS*) dalam proses pengambilan keputusan. Prioritas ini akan mendukung restrukturisasi Kementerian Pendidikan termasuk peningkatan kapasitas anggota kabinet, gubernur, dan pejabat daerah. Kementerian Pendidikan akan direstrukturisasi sesuai dengan perangkat dan proses konsep manajemen modern, untuk meningkatkan efisiensi dalam penyediaan berbagai layanan pendidikan.



4. Pendidikan pra-sekolah. Prioritas ini akan mencakup perluasan layanan prasekolah dengan penekanan pada kelompok rentan, serta peningkatan kondisi belajar mengajar. Hal ini juga memerlukan kemitraan dengan sektor swasta untuk meningkatkan sumber daya yang ditujukan untuk layanan prasekolah.
5. Literasi dan pendidikan orang dewasa. Prioritas ini akan menyasar orang dewasa yang buta huruf, khususnya perempuan, dengan meningkatkan cakupan kelas literasi, serta meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Diharapkan dapat mencapai hasil melalui strategi berikut: Perluasan program literasi; diversifikasi pelatihan yang diberikan baik di pusat pelatihan dasar maupun pusat pelatihan perempuan; memperbaiki lingkungan belajar melalui pengembangan lebih lanjut kurikulum literasi; Hal ini juga memerlukan kursus teknis tambahan yang dapat memberikan dampak positif pada motivasi siswa untuk mengambil kursus tersebut dan membekali mereka dengan keterampilan kerja.

### 3. Transisi

Analisis situasi pendidikan mendorong Kementerian Pendidikan Yaman menerbitkan Rencana Pendidikan Transisional (*Transitional Education Plan*). Analisis situasi ini menyajikan aspek-aspek kunci dari indikator sekolah, kualitas dan manajemen penyediaan pendidikan di Yaman. Dasar analisis situasi adalah data sensus sekolah tahun ajaran 2015/16 untuk pendidikan dasar dan menengah. Buku statistik tahunan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan (*Ministry of Education/MoE*) pada

tahun-tahun sebelumnya digunakan untuk memberikan informasi mengenai perkembangan beberapa tahun terakhir. Data inspeksi disediakan oleh Direktorat Jenderal Inspeksi Kementerian Pendidikan (*MoE General Directorate for Examination*). Direktorat Jenderal Pengembangan Sumber Daya Manusia (*The General Directorate of Human Resource Development*) menyediakan data sumber daya manusia yang relevan. Keterbatasan informasi yang diberikan mengenai TEVT dan pendidikan tinggi didasarkan pada indikator pendidikan yang dikeluarkan oleh Dewan Tertinggi Perencanaan Pendidikan (*Supreme Council for Educational Planning*). Buku tahunan statistik terbaru adalah dari 2013/14. Data keuangan berasal dari Volume Akuntansi Final tahun 2007 hingga 2013 dan perkiraan anggaran tahun 2007-2015 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. Data dan proyeksi kependudukan, yang disiapkan oleh Badan Pusat Statistik dan Dewan Kependudukan Nasional, disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Proyeksi populasi PBB tidak digunakan sesuai permintaan Kementerian Pendidikan (*Ministry of Education, 2019*).

*Education stakeholders* di Yaman berupaya memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat dalam konteks krisis politik, kemanusiaan, dan ekonomi. Hilangnya pendidikan sejak kerusuhan politik pada tahun 2011 sangat mengkhawatirkan mengingat tren demografi penduduk yang relatif muda dan berkembang pesat. Sekitar 40% penduduk Yaman berusia 0 hingga 14 tahun. Pada tahun 2007, populasi Yaman diperkirakan mencapai 22,3 juta jiwa dan diperkirakan akan mencapai 47 juta jiwa pada tahun 2040. Pada tahun 2015, jumlah penduduk usia sekolah dasar (6 hingga 14 tahun) diperkirakan mencapai 5,9 juta jiwa (49% perempuan dan 51% laki-laki)<sup>11</sup>. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, sistem

pendidikan perlu mengakomodasi kelompok umur yang lebih besar (Ministry of Education, 2019).

Kontribusi internasional sebagai bentuk dukungan terhadap rekonstruksi pendidikan di Yaman salah satunya pada tahun 2021, kegiatan pendidikan UNICEF difokuskan pada dukungan terhadap anak-anak untuk terus belajar dan ditujukan untuk memperkuat hubungan kemanusiaan-pembangunan, yang secara setara menargetkan anak laki-laki dan perempuan (UNICEF, 2021):

- Meskipun menghadapi berbagai tantangan, UNICEF menyediakan materi pembelajaran individual bagi lebih dari 209.000 anak dan lebih dari setengah juta (567.000) anak memiliki akses terhadap pendidikan formal dan nonformal, termasuk pembelajaran dini dan dukungan untuk Ujian Nasional. 229 sekolah menerapkan protokol sekolah aman (pencegahan dan pengendalian infeksi).
- Sebagai bagian dari tanggap darurat untuk anak-anak pengungsi internal, program Pendidikan dalam Keadaan Darurat (*Education in Emergencies/EiE*) nasional diluncurkan pada kuartal terakhir tahun 2021 yang menargetkan 40.000 anak putus sekolah (60 persen perempuan) dengan layanan pendidikan dan perlindungan anak, dengan fokus khusus pada anak-anak di Ma'rib.

Menurut laporan *International Parliamentary Network for Education* (IPNED) pada Mei 2024, meskipun telah tercapai gencatan senjata kondisi pendidikan di Yaman belum membaik. Sepertiga dari keluarga yang disurvei memiliki setidaknya satu anak yang putus sekolah dalam dua tahun terakhir. Ada 1,3 juta anak terlantar di Yaman yang dua kali lebih mungkin putus sekolah daripada teman sebayanya. Tanpa solusi yang dapat

diperkirakan untuk pengungsian mereka, anak-anak ini menghadapi risiko yang lebih besar untuk terganggunya pendidikan, yang membahayakan masa depan mereka dan berpotensi melanggengkan siklus kemiskinan dan ketidakstabilan. Lebih jauh, lebih dari 58% orang tua mengatakan akses pendidikan anak-anak mereka belum membaik sejak gencatan senjata. Dinamika konflik yang sedang berlangsung telah mempersulit upaya perbaikan situasi ekonomi. Hal ini juga telah mengurangi kapasitas pemerintah untuk mendukung pendidikan, termasuk menyediakan gaji guru yang memadai, sumber daya pendidikan, dan merehabilitasi sekolah yang rusak. Pihak berwenang Yaman, negara donor, dan pelaku kemanusiaan, perlu segera berkomitmen pada proses perdamaian baru, memastikan perlindungan sekolah dan peningkatan bantuan yang signifikan untuk sistem pendidikan Yaman (Ulstein, 2024).

## SIMPULAN

Terlepas dari kondisi yang tidak begitu menguntungkan dalam rentang waktu yang lama, pemerintah Republik Yaman memiliki visi progresif dengan dilatari kesadaran akan kondisi yang masih jauh tertinggal dari negara-negara lain, bahkan dari beberapa negara tetangga seperti Arab Saudi maupun negara-negara Islam di kawasan lain.

Khusus pada sektor pendidikan, pemerintah Yaman berusaha mengadopsi model-model pendidikan modern kemudian menuangkannya ke dalam perangkat strategi pendidikan yang diaplikasikan secara berjangka. Konflik memaksa proses pembangunan pendidikan di Yaman untuk terhenti sementara. Upaya rekonstruksi dengan melibatkan berbagai pihak berjalan di tengah situasi yang masih tidak menentu. PLC yang berkuasa saat ini, yang lebih

menyerupai pemerintahan transisional, tampak belum memiliki langkah signifikan dalam meneruskan misi aktual pengejawantahan *Yemen Strategic Vision 2025*.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- AA. (2015). Yemen's Hadi denies Aden secession. AA Politics. <https://www.aa.com.tr/en/politics/yemens-hadi-denies-aden-secession/64813>
- AA. (2015). After losses, Houthis make gains in Yemen's Taiz. AA Politics. <https://www.aa.com.tr/en/politics/after-losses-houthis-make-gains-in-yemen-s-taiz/16054>
- Ardemagni, Eleonora. (2022). Yemen's Post-Hybrid Balance: The New Presidential Council. <https://carnegieendowment.org/sada/2022/06/yemens-post-hybrid-balance-the-new-presidential-council?lang=en>
- BBC. (2019). Yemen Profile-Timeline. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14704951>
- BBC. (2008). Deadly blast strikes Yemen mosque. [http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle\\_east/7379929.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7379929.stm)
- Constitution of the Republic of Yemen (2020). Yemen's Constitution of 1991 with Amendments through 2015. [constituteproject.org](http://constituteproject.org)
- Diyarti, Sisi., Asasriwarni., Zulfan. (2022). *Analisis Sistem Peradilan Agama di Negara Yaman dan Pelaksanaannya*. Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyah.
- education-profiles.org. (2021). Yemen: Non-State Actors in Education. Al Qasimi Foundation. <https://education-profiles.org/northern-africa-and-western-asia/yemen/~non-state-actors-in-education>
- education.stateuniversity.com. (2024). Yemen Educational System-overview. <https://education.stateuniversity.com/pages/1687/Yemen-EDUCATIONAL-SYSTEM-OVERVIEW.html>
- Global Education Monitoring Report. (2016). *Education for people and planet: Creating sustainable futures for all*. UNESCO Publishing.
- Hensch, Mark. (2017). Yemen SEAL raid yielded no significant intel: report. *The Hill*. <https://thehill.com/policy/international/middle-east-north-africa/321471-yemen-seal-raid-yielded-no-significant-intel/>
- Hazhami, Hizri Billah., Priyoyudanto, F., (2023). *Sistem Pendidikan Tradisional di Ribath Hadramaut Yaman pada Masa Modern*. Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya. Universitas Al-Azhar. Indonesia.
- Johnsen, Gregory D. (2015). Meet The Group That Now Rules Yemen; Who are the Huthis, where did they come from, and where are they going?. BuzzFeed News'.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024). Hubungan Bilateral. Kedutaan Besar Republik Indonesia. Sana'a Yaman. [https://kemlu.go.id/sanaa/id/pages/hubungan\\_bilateral/1783/etc-menu](https://kemlu.go.id/sanaa/id/pages/hubungan_bilateral/1783/etc-menu)
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). Indonesia-Yaman bahas Pengembangan Pendidikan Islam. <https://kemenag.go.id/nasional/indonesia-yaman-bahas-pengembangan-pendidikan-islam-w7xey3>
- Khoiruddin, M. (2018). *Pendidikan Islam Tradisional dan Modern* dalam Hazhami, Hizri Billah., Priyoyudanto, F., (2023). *Sistem Pendidikan Tradisional di Ribath Hadramaut Yaman pada Masa Modern*. Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya. Universitas Al-Azhar. Indonesia.

- Kochenburger, Alexander. (2023). Rebuilding for the Future: A Spatial Analysis of Education Reconstruction in Yemen. New Lines Institute. <https://newlinesinstitute.org/geo-economics/development/rebuilding-for-the-future-a-spatial-analysis-of-education-reconstruction-in-yemen/>
- Middle East Monitor (MEMO). (2022). Yemen's President Hadi has effectively been sacked by Saudi Arabia. <https://www.middleeastmonitor.com/20220420-yemens-president-hadi-has-effectively-been-sacked-by-saudi-arabia/>
- Ministry of Education. (2008). *The Development of Education IN THE REPUBLIC OF YEMEN (THE NATIONAL REPORT)*. Presented to: The 48<sup>th</sup> session of the International Conference on Education, Geneve, 25-28 November 2008.
- Ministry of Education. (2015). *Yemen Education Sector Plan-MID TERM RESULTS FRAMEWORK 2013-2015*. A document of Yemen Ministry of Education.
- Ministry of Education. (2019). *Transitional Education Plan 2019/20-2021/22*.
- Nasution, Abdul Fattah. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Kreatif. Bandung.
- President Saleh Website. (2007). Marshal Ali Abdullah Saleh President of the Republic of Yemen. [http://presidentsaleh.gov.ye/shownews.php?lng=en&\\_newsctgry=2](http://presidentsaleh.gov.ye/shownews.php?lng=en&_newsctgry=2)
- The Metropolitan Museum of Art. (2000). "Arabian Peninsula, 2000-1000 B.C.", *Timeline of Art History*. New York. <http://www.metmuseum.org/toah/ht/03/wap/ht03wap.htm>
- Trading Economics. (2024). Yaman-PDB. <https://id.tradingeconomics.com/yemen/gdp>
- Transfeld, Mareike. (2016). *Yemen's education system at a tipping point: Youth between their future and present survival*. POMEPS Studies 29, "Politics, Governance, and Reconstruction in Yemen".
- U. S. Department of State. (2011). Background Notes: Mideast. InfoStrategist.com 2011.
- Ulstein, Dag-Inge. (2024). In Yemen, Despite 2 years of Truce, The Education Crisis Continues. International Parliamentary Network of Education. <https://www.ipned.org/news-and-views/yemen-education-crisis>
- UNICEF. (2021). Education. <https://www.unicef.org/yemen/education>
- United Nations. (2024). Least Developed Country Category: Yemen Profile. Department of Economic and Social Affairs. *Economic Analysis*. <https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category-yemen.html>
- Wenner, Manfred W., Robert Burrowes. (2024). *Yemen*. Britannica. <https://www.britannica.com/place/Yemen>
- World Bank Group. (2024). GNI per capita, Atlas method (current US\$) – Yemen, Rep.. World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?locations=YE>